



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6984-6995

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Adnan Abdul Aziz<sup>1✉</sup>, Eny Kusumawati<sup>2</sup>

Mahasiswa Akutansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: [b200190383@student.ums.ac.id](mailto:b200190383@student.ums.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi terkait keuangan pemerintah daerah secara transparan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, Pertumbuhan Ekonomi dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022. Jumlah populasi sebanyak 40 Kabupaten/Kota dengan 120 observasi. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Ukuran pemerintah, Tingkat kekayaan, Tingkat ketergantungan, Pertumbuhan ekonomi, Temuan audit BPK, Kinerja keuangan*

## Abstract

The government is obliged to provide information related to local government finances transparently to the public, so that the public can provide an assessment of the financial performance of the local government which can be an evaluation for the local government. This study aims to determine the effect of local government size, level of regional wealth, level of dependence on the center, Economic Growth and BPK audit findings on local government financial performance in regencies/cities in Central Java Province and Yogyakarta Special Region in 2020-2022. The total population is 40 regencies/cities with 120 observations. Researchers used multiple linear regression analysis. The results of this study are the variable level of dependence on the center has an effect on local government financial performance, while the variable size of local government, level of regional wealth, economic growth, and BPK audit findings have no effect on local government financial performance.

*Keyword: Government size, Wealth level, Dependency level, Economic growth, BPK audit findings, Financial performance*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015). Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengawasi keseluruhan pembangunan daerah umumnya berujung pada pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat melimpahkan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dengan mandiri seluruh kepentingan daerahnya (Rosemary et al., 2016), Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara otonom yang dihasilkan melalui pemanfaatan potensi daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah, menjadi syarat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

Reformasi birokrasi otonomi daerah menurut Ara (2016) telah membawa perubahan bagi sistem administrasi keuangan negara dengan ditetapkannya paket Undang-undang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, Paket undang-undang tersebut menginginkan agar pengelolaan keuangan daerah transparan dan akuntabel.

Salah satu tugas paling krusial yang harus diselesaikan oleh setiap daerah di Indonesia adalah pengelolaan keuangan. Keberhasilan pertumbuhan dan eksekusi pemerintah daerah sangat tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Tercapainya pembangunan dan pelaksanaan pemerintah daerah akan memberikan pengelolaan keuangan daerah yang baik

dan optimal, yang akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Sularso dan Restianto (2011) menjelaskan bahwa kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari bagaimana daerah tersebut mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip yang ada, meliputi transparansi dan akuntabilitas yang nantinya dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi (Lucky, 2013).

Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat serta mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya (Rondonuwu et al., 2015). Dalam proses pembangunan daerah, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di gunakan sebagai tolak ukur.

Masyarakat dapat mengevaluasi bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya, apakah sudah sesuai dengan pendapatan yang diterima daerah dan apakah alokasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dari pelaporan, dalam rangka mencapai prinsip transparansi. Pemerintah wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (perubahan kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan dipergunakan untuk mengidentifikasi bagaimana alur keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Darwanis & Saputra, 2014).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi beberapa faktor, peneliti memfokuskan pada lima variabel: ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, pertumbuhan ekonomi, dan akuntabilitas.

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz, 2016).

Penelitian Lestari et al. (2019) memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan Pemda diprosikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. tingginya tingkat kekayaan daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berjalan dengan baik. Penelitian Mariasari (2023) memberikan bukti empiris bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pusat menunjukkan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin rendah tingkat ketergantungan pada pusat maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian Setiani & Ismunawan (2022) memberikan bukti empiris bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai indikator keberhasilan dan kemajuan suatu negara atau daerah. pertumbuhan ekonomi menjadi hal utama yang perlu dicapai karena jika pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan baik maka pengangguran, kemiskinan dan tingkat ketergantungan akan mengalami penurunan sehingga otomatis pengelolaan keuangan suatu pemerintahan juga akan baik, semakin baik pertumbuhan ekonomi maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian Wulandari (2022) memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit BPK diperoleh dari pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Temuan berupa penyalahgunaan anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila terdapat temuan audit BPK dalam laporan keuangan maka kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota dianggap buruk. Penelitian Alpi & Ramadhan (2018) memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik. Pendekatan ini bersifat empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis dan memberikan informasi atau penemuan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan

tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).

Populasi penelitian ini adalah 29 kabupaten dan enam kota di Provinsi Jawa Tengah ditambah empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rentang waktu tiga tahun dimulai dari tahun 2020-2022. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh sehingga semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdapat dalam situs resmi Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Analisis data penelitian ini menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu melalui analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis (uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Kinerja Keuangan	120	-0,617	1,444	-0,005	0,384
Ukuran Pemerintah	120	28,484	30,743	29,096	0,420
Tingkat Kekayaan	120	0,105	0,512	0,205	0,075
Tingkat Ketergantungan	120	0,235	0,611	0,408	0,444
Pertumbuhan Ekonomi	120	-0,322	-0,322	0,059	0,151
Temuan Audit BPK	120	3	4	3,991	0,091

Hasil analisis deskriptif menunjukkan jumlah analisis sebanyak 120 observasi dalam rentang waktu tiga tahun yaitu 2020-2022. Nilai rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah minus sebesar -0,005 yang artinya pertumbuhan belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020-2022 rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,5%. Nilai rata-rata ukuran pemerintah yang diprosikan dengan ln total aset sebesar 29,096 yang artinya rata-rata ukuran pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020-2022 sebesar Rp4.851.644.350.781.

Nilai rata-rata tingkat kekayaan daerah yang diprosikan dengan rasio PAD dibagi total pendapatan daerah sebesar 0,205 yang artinya proporsi PAD yang dimiliki pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022 rata-rata sebesar 20,460% dari total pendapatan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan total pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022 sebesar 20,460% berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Nilai rata-rata tingkat ketergantungan pada pusat sebesar 0,408, yang yang artinya proporsi DAU yang dimiliki pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022 rata-rata sebesar 40,757% dari total pendapatan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata tingkat ketergantungan pada pusat di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022 sebesar 40,757%. Total pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 sebesar 40,757% berasal dari dana alokasi umum (DAU).

Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan pertumbuhan PAD sebesar 0,05829. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022 rata-rata mengalami kenaikan PAD sebesar 5,829%. Nilai rata-rata temuan audit BPK yang diproksikan opini BPK sebesar 3,99167. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020-2022 rata-rata memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Uji asumsi klasik menggunakan *one simple Kolmogorov smirnov*. Uji multikolinieritas dengan melihat *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance value* dan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Spearman dengan melihat pada tingkat signifikansi hasil regresi nilai *absolute residual*, sehingga dapat dilakukan uji hipotesis dengan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$KK = 5,226 - 0,139UPD - 0,197TKD - 3,480TKP - 0,089PE + 0,073TAB + e$$

Table 2. Hasil Uji Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,226	3,703		1,411	0,161
Ukuran Pemerintah	-0,139	0,108	-0,152	-1,285	0,201
Tingkat Kekayaan	-0,197	0,582	-0,039	-0,339	0,736
Tingkat Ketergantungan	-3,480	1,052	-0,402	-3,309	0,001
Pertumbuhan Ekonomi	-0,089	0,235	-0,035	-0,377	0,707
Temuan Audit BPK	0,069	0,376	-0,016	0,183	0,855

Hasil uji  $R^2$  untuk mengetahui nilai *Adjusted R Square*, menunjukkan besarnya nilai adjusted R2 adalah 0,059 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen sebesar 5,9% sedangkan sisanya sebesar 94,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji F menunjukkan hasil nilai signifikansi dari uji F sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa model regresi berganda ini sudah fit dan layak digunakan sebagai model penelitian.

Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,201. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diwakili oleh total aset daerah tidak memiliki dampak yang signifikan pada kinerja pemerintah daerah. Ini menandakan bahwa total aset pemerintah daerah, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk optimalisasi program-program pemerintah dan operasional guna memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.

Besarnya ukuran pemerintah daerah yang diwakilkan oleh aset yang dimiliki pemerintah bernilai besar tidak menjamin meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun pemerintah daerah memiliki total aset yang besar, hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Hal ini berarti kinerja keuangan tidak sepenuhnya tergantung pada ukuran atau nilai total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Hasil ini mungkin menunjukkan betapa pentingnya strategi pengelolaan aset yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu tidak hanya fokus pada ukuran aset saat ini tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan potensi pertumbuhan nilai aset di masa depan, seperti investasi dalam infrastruktur, yang mungkin memerlukan waktu untuk memberikan dampak positif yang terlihat pada kinerja keuangan. Oleh karena itu, perlu memahami bahwa beberapa aset mungkin memberikan hasil dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Dwitama & Rahayu (2020) dan Ramahdani & Trisnarningsih (2022) yang memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat kekayaan daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,736. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya tingkat kekayaan daerah yang diukur dari kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata tingkat kekayaan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022 hanya sebesar 20,460%. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, sehingga tingkat kekayaan daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

Keberadaan PAD yang kecil mungkin mengindikasikan bahwa daerah sangat bergantung pada sumber pendapatan eksternal, seperti dana perimbangan atau transfer pusat. Hal ini dapat menunjukkan keterbatasan dalam menciptakan pendapatan lokal yang dapat diandalkan dan dapat menghadirkan risiko keuangan jika ada perubahan alokasi dana dari pusat.

Jika kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang memiliki PAD yang besar sudah seharusnya memberikan kinerja keuangan yang baik pula. Apabila pemerintah daerah yang memiliki PAD yang besar tetapi kinerjanya memiliki penilaian buruk maka pemerintah daerah tersebut kedepannya harus melakukan perbaikan dan peningkatan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Yulia dan Dhini (2020) dan Defitri et al. (2021) yang memberikan bukti empiris tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat ketergantungan pada pusat menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pusat, yang dapat diukur melalui Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan mereka. DAU sebagai sumber dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung tugas pemerintah daerah, seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan efisiensi, terutama dalam peningkatan kinerja keuangan.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat memiliki pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi lebih nyata, dengan menekankan penggunaan pendapatan daerah sendiri untuk mencapai efisiensi yang lebih besar.

Melalui analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat ketergantungan pada pusat di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2020-2022 mencapai sekitar 40,757%. Ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi proporsi ketergantungan pada pusat dalam suatu daerah, semakin besar kemungkinan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi pengelolaan dana transfer dan upaya pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih tinggi.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Djuniar et al. (2021) yang memberikan bukti empiris bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,707. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan dengan pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini dapat menunjukkan pentingnya peninjauan dan perbaikan dalam kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah mungkin perlu mempertimbangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi pendapatan lokal terhadap kesehatan keuangan mereka.

Hasil Penelitian ini mengindikasikan, bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak selalu diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun pertumbuhan ekonominya ditahun 2020-2022 rata-rata sebesar 5,829%, hal ini disebabkan karena faktor-faktor produksi di suatu daerah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka waktu singkat (satu tahun), akan tetapi memerlukan jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan.

Jika pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan oleh PAD tidak berpengaruh, ini dapat menunjukkan pentingnya peninjauan dan perbaikan dalam kebijakan pengelolaan

pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah mungkin perlu mempertimbangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi pendapatan lokal terhadap kesehatan keuangan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Setiani & Ismunawan (2022) dan Febrianty & Putra (2023) yang memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Temuan audit BPK menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,855. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, Sehingga dapat disimpulkan temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan audit BPK diprosikan dengan opini yang diberikan oleh BPK. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP maupun WDP tidak menjamin baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah belum dapat menjadi faktor penggerak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian, opini dari temuan audit BPK tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat melalui data pada Kabupaten Kendal di tahun 2020 yang mendapatkan opini WTP akan tetapi memiliki nilai kinerja keuangan yang rendah. Sedangkan pada Kabupaten Pematang tahun 2022 saat mendapatkan opini WDP pertumbuhan belanja modal meningkat akan tetapi saat mendapatkan opini WTP pertumbuhan belanja modal menurun.

Temuan audit BPK tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan dapat dikarenakan ukuran yang digunakan oleh peneliti menggunakan hasil opini BPK, pada penelitian Nugraheni & Adi (2016) yang menggunakan banyaknya jumlah temuan pelanggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Kurnia (2020) yang memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut: (1) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (2) Tingkat kekayaan daerah

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya proporsi tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (3) Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya proporsi tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (4) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (5) Temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini auditor BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 103–114.
- Ara, Samuel Christian Titiek Herwanti, dan Endar Pituringsih. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemda Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba. *JAFFA* Vol. 04 No. 1 April 2016
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1 SE-Section Editor). <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34>
- Darwanis dan Ryanda Saputra. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (2), hal.183- 199.
- Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ekonomia*, 11(1), 10–19. <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/STIE-JE>
- Djuniar, L., Sunardi, S., Sari, D., & Satria, E. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 5(01), 50–61.
- Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2 SE-Articles), 30–46. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.154>
- Lestari, A. A., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(October 1945), 131–144.
- Lucky, D. (2013). Analysis of the Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and

- Poverty Through Capital Expenditure (Case Study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(19), 7–18.
- Mariasari, V. (2023). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PERKAPITA, JUMLAH PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 110-134.
- Noviyanti, A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013–2015. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 12(2), 19–42.
- Ramahdani, A. F., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 301–310. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.3924>
- Rosemary., Chinyeaka Justine., dan Barisua Barry. (2016). Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal OF Bussines and Management Review (OMAN Chapter)*, 5 (10) ), pp : 38-54.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). Analysis Efficiency and Effectiveness Regional Financial Management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 23(4), 23–32.
- Setiani, I., & Ismunawan. (2022). Pengaruh Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 261–276.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1 (2), hal.109- 124.
- Wulandari, S. O., Thoyib, M., & Mubarak, M. H. (2022). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1134-1143.